

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A
JULI – DESEMBER TAHUN 2021**

LAPORAN

HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

PADA

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**



SEMESTER 2

BULAN JULI - DESEMBER

TAHUN 2021

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Disahkan di Yogyakarta Pada Hari Rabu, 5 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi
Yogyakarta Kelas IA



(Dr. Erida Ariyani, S.H., M.Hum)

Ketua Tim Survey



(Heri Kurniawan, S.H., M.H)

Sekretaris I Tim Survey



(Eka Surya Setiawan, S.H)

Sekretaris II Tim Survey



(Nindya Yosdalu Putra)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Tuhan YME, atas berkat limpahan rahmatnya telah disusun Laporan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik yang berorientasi pada wilayah bebas dari korupsi adalah dengan melakukan Survei Persepsi Korupsi kepada pengguna layanan yang dikumpulkan melalui instrument yang diisi, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA kepadamasyarakat.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa persepsi korupsi dalam hal pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/ diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA, yang diambil dengankuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan hasil survei ini, dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja organisasi agar dapat terwujud wilayah bebaskorupsi.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 30 Desember 2021

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I	i
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud DanTujuan	2
1.3. Landasan Hukum.....	2
1.4. Rencana Kerja	3
BABII	5
METODOLOGI	5
2.1. Metode Penelitian	5
2.2. Populasi DanSampel	5
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	6
2.5. Teknik Analisis Data	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan	7
BABIII	9
INDEKS PERSE PSIKORUPSI	9
3.1. Profil Responden	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi Perindikator	13
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pada Pengadilan.....	26
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan	28
BABIV	30
PENUTUP	30
4.1. Kesimpulan.....	30
4.2. Rekomendasi.....	30

DAFTAR TABEL

<i>No.Tabel</i>		<i>Halaman</i>
1.	Ruang lingkup survei IndeksPersepsi Korupsi.....	8
2.	Nilai Persepsi.....	8
3.	Tingkat pendidikan responden.....	9
4.	Jenis pekerjaan responden.....	10
5.	Domisili Responden.....	11
6.	Usia responden.....	12
7.	Jenis Kelamin Responden.....	13
8.	Indeks pada indikator manipulasi peraturan.....	14
9.	Indeks pada penyalahgunaan jabatan.....	15
10.	Indeks pada indikator menjual pengaruh.....	17
11.	Indeks pada indikator transaksi biaya.....	18
12.	Indeks pada indikator Biaya Tambahan.....	19
13.	Indeks pada Indikator Hadiah.....	20
14.	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya.....	21
15.	Indeks pada Indikator Percaloan.....	23
16.	Indeks pada indikator Perbuatan Curang.....	24
17.	Indeks pada indikator Transaksi Rahasia.....	25
18.	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.....	26
19.	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.....	27
20.	Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	28

DAFTAR GAMBAR

<i>No. Gambar</i>	<i>Halaman</i>
1. Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas....	7
2. Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir...	9
3. Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan Utama.....	10
4. Karakteristik Responden berdasarkan Wilayah Domisili.....	11
5. Karakteristik Responden berdasarkan Usia.....	12
6. Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin.....	13
7. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Manipulasi Peraturan	14
8. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan	16
9. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Menjual Pengaruh....	17
10. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transaksi Biaya.....	18
11. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Biaya Tambahan.....	19
12. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Hadiah.....	20
13. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transparansi Biaya...	22
14. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Percaloan.....	23
15. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Perbuatan Curang....	24
16. Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transaksi Rahasia....	25
17. Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta...	27

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar

- c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri/Tinggi. Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 163 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja

petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring/angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0 -100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawahini:

Tabel 1.

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 2.**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3.
Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden

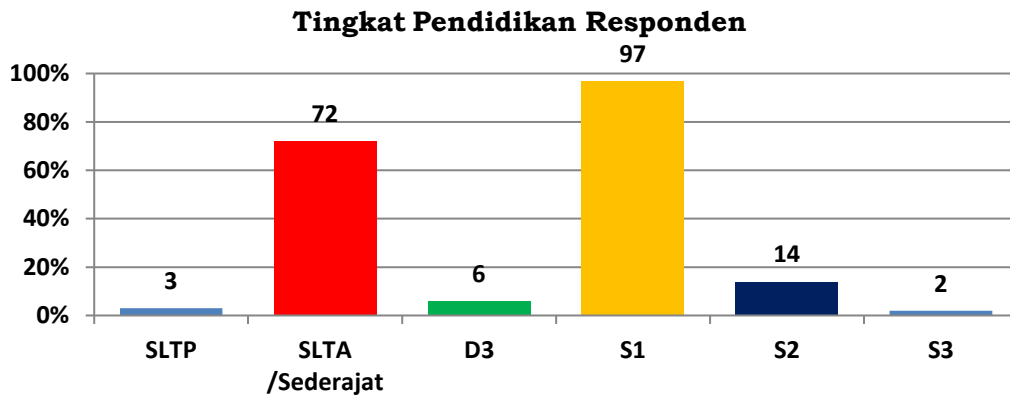
3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada pengadilan mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 (50%) dan SLTA (37,1%).

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

Nomor	Pendidikan terakhir	Frekuensi	%
1	SLTP	3	1,54
2	SLTA /Sederajat	72	37,11
3	D3	6	3,09
4	S1	97	50
5	S2	14	7,21
6	S3	2	1,03
Jumlah		194	100,0

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 2.
Karakteristik Responden berdasarkan Pendidikan Terakhir

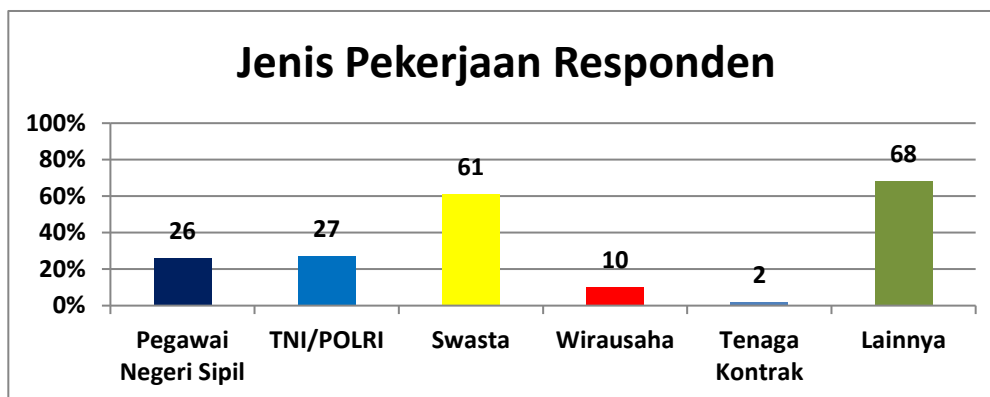
3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 35,05% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan memiliki pekerjaan sebagai pekerja lainnya .

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

Nomor	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	Pegawai Negeri Sipil	26	13,40
2	TNI/POLRI	27	13,91
3	Swasta	61	31,44
4	Wirausaha	10	5,15
5	Tenaga Kontrak	2	1,03
6	Lainnya	68	35,05
Jumlah		194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 3.

Karakteristik Responden berdasarkan Pekerjaan Utama

3.1.3. Jenis Kelamin Responden

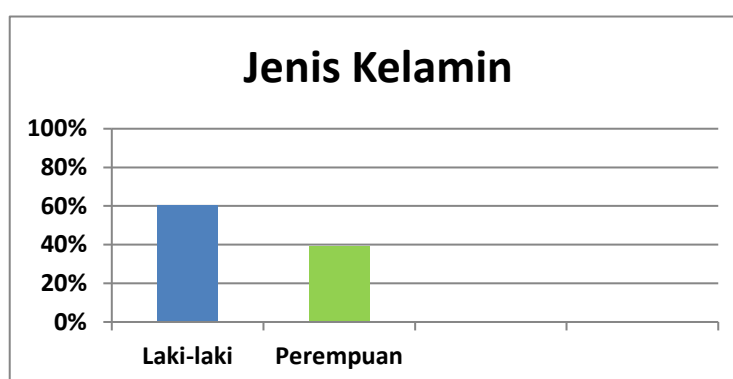
Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak berjenis kelamin laki-laki 60,07 %

Tabel 8.

Jenis Kelamin Responden

Nomor		Frekuensi	%
1	Laki-laki	118	60,02
2	Perempuan	76	39,17
Jumlah		194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 6.

Karakteristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin

3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index **3,98** berada pada interval skor **3,26 s/d 4,00** kategori **“Bersih dari**

Korupsi”.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada PengadilanNegeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari **manipulasi peraturan.**

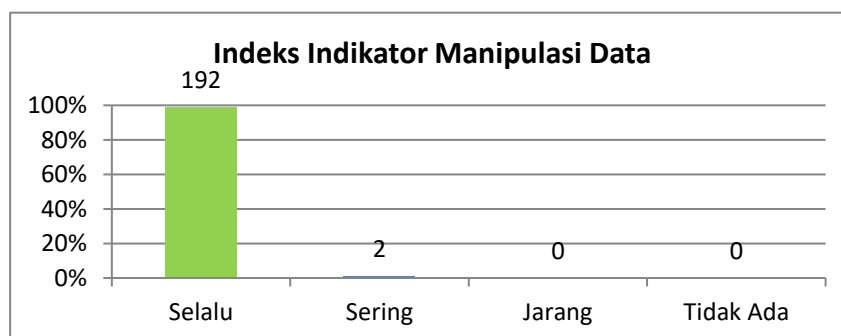
Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup manipulasi peraturan dengan pertanyaan **“ Apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? ”** dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 8.

Indeks pada indikator manipulasi peraturan

No.		Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	192	98.96
2.	Sering	3	2	1.03
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Ada	1	0	0
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 7.
Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Manipulasi Peraturan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa Pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu.

3.2.2 Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index **4,00** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”.**

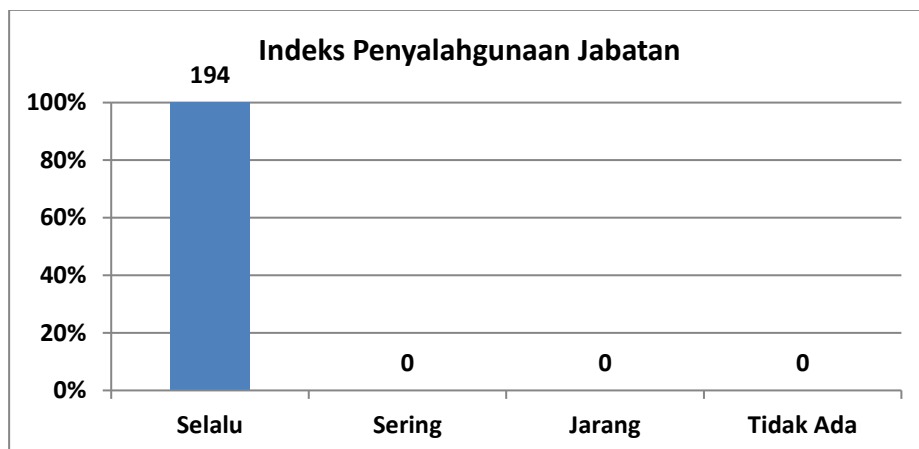
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari **penyalahgunaan jabatan.**

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup penyalahgunaan jabatan dengan pertanyaan **“Apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 9.
Indeks pada penyalahgunaan jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	194	100
2.	Sering	3	0	0
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Ada	1	0	0
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 8.
Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu.

3.23. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index **3,93** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari **Menjual Pengaruh**.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup menjual pengaruh dengan pertanyaan

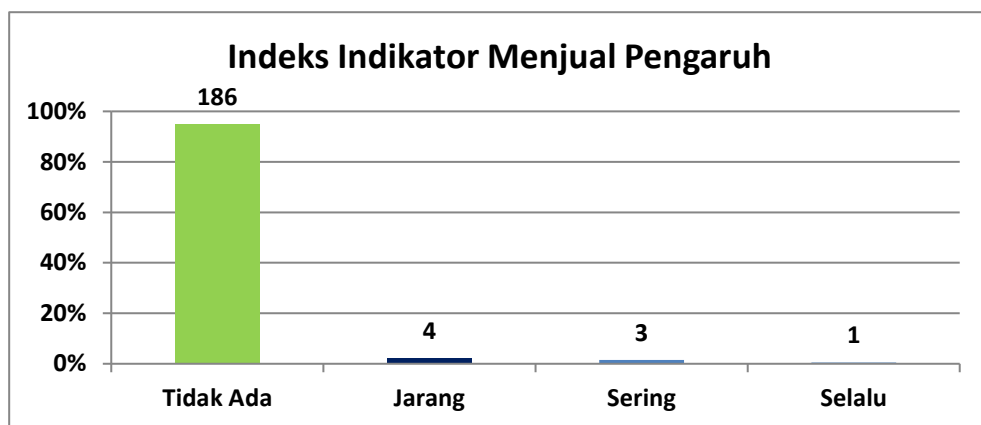
“Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara?” dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 10.

Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	186	95,07
2.	Jarang	3	4	2,06
3.	Sering	2	3	1,53
4.	Selalu	1	1	0,51
Jumlah			194	100,000

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 9.

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Menjual Pengaruh

Tabel tersebut menjelaskan bahwa tidak pernah ada karyawan pengadilan yang menghubungi menawarkan untuk membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara.

3.24. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,89** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

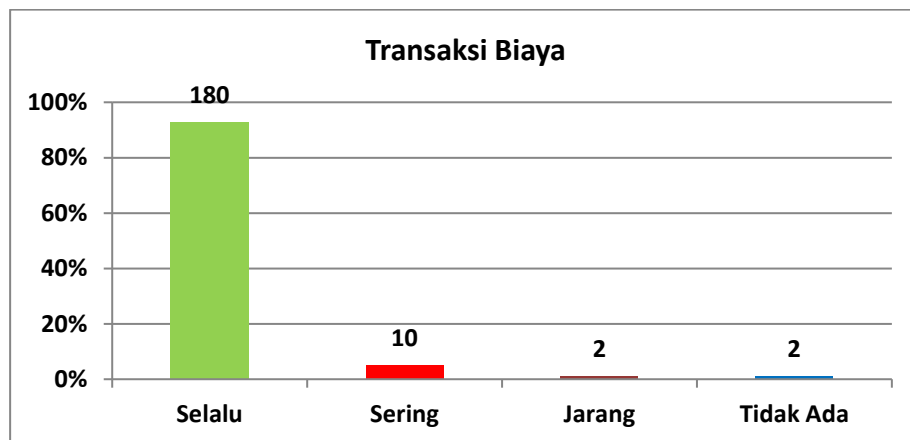
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA **transparan** dalam mendapatkan informasi tentang **tarif/biaya** baik melalui website ataupun petugas layanan. Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup transaksi biaya dengan pertanyaan **“Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 11.

Indeks pada indikator transaksi biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	180	92,78
2.	Sering	3	10	5,15
3.	Jarang	2	2	1,03
4.	Tidak Ada	1	2	1,03
Jumlah			194	100,000

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 10.

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transaksi Biaya

Tabel tersebut menjelaskan bahwa masyarakat selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan.

3.25. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator **Biaya Tambahan** ini menunjukkan hasil pada index **3,88** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari **Biaya Tambahan**.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup biaya tambahan dengan pertanyaan **“Apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini :

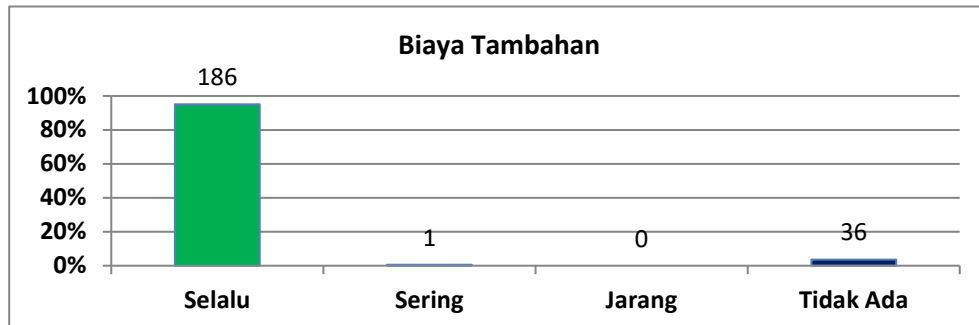
Tabel 12.

Indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Selalu	4	186	95,07

2.	Sering	3	1	0,51
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Ada	1	7	3,60
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 11.
Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Biaya Tambahan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa masyarakat selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan.

3.26. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index **3,86** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih Dari Korupsi”**.

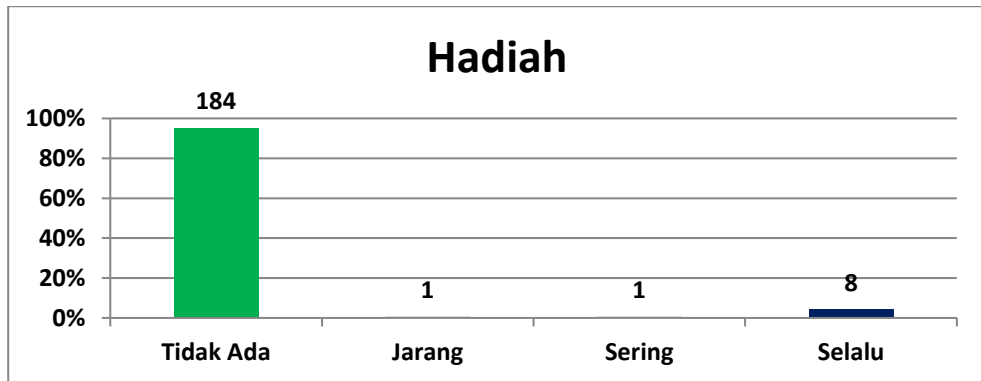
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari **Hadiah**.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup hadiah dengan pertanyaan **“Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta)?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 13.
Indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	184	94,84
2.	Jarang	3	1	0,51
3.	Sering	2	1	0,51
4.	Selalu	1	8	4,12
Jumlah			163	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 12.
Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Hadiah

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar masyarakat tidak pernah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta).

3.27. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index **3,90** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA transparan dalam transaksi keuangan / pembayaran (**Transparansi Biaya**).

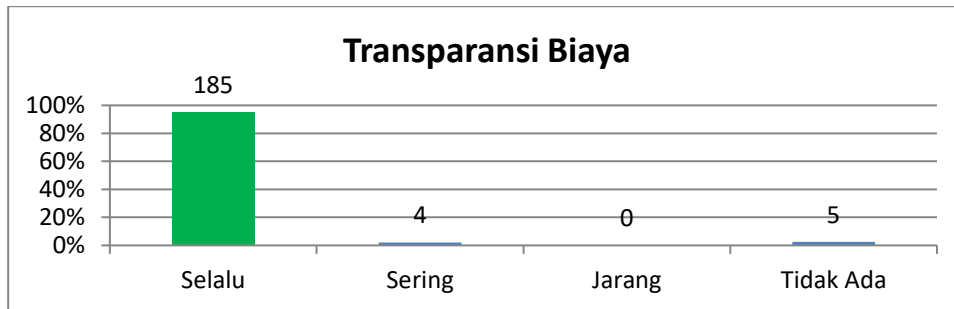
Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transparansi Biaya dengan pertanyaan **“Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 14.

Indeks pada indikator Transparansi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Selalu	4	185	95,36
2.	Sering	3	4	2,06
3.	Jarang	2	0	0
4.	Tidak Ada	1	5	2,57
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 13.
Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transparansi Biaya

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian responden selalu menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

3.28. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,98** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

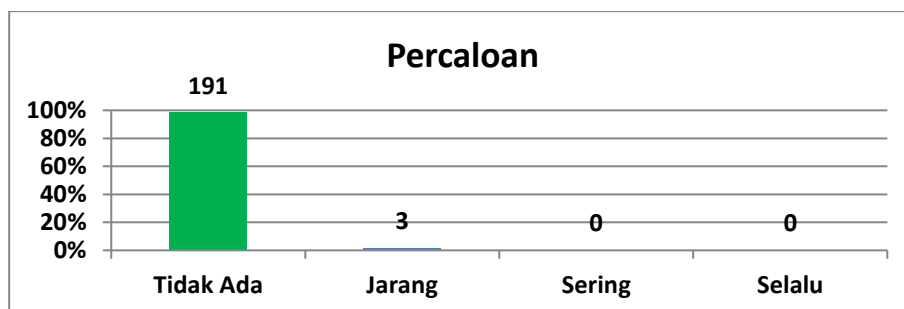
Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari praktik **Percaloan**.

Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Percaloan dengan pertanyaan **“Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 15.
Indeks pada indikator percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	191	98,45
2.	Jarang	3	3	1,54
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 14.
Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Percaloan

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar responden tidak pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di pengadilan.

3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index **3,96** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari praktik **Perbuatan Curang**.

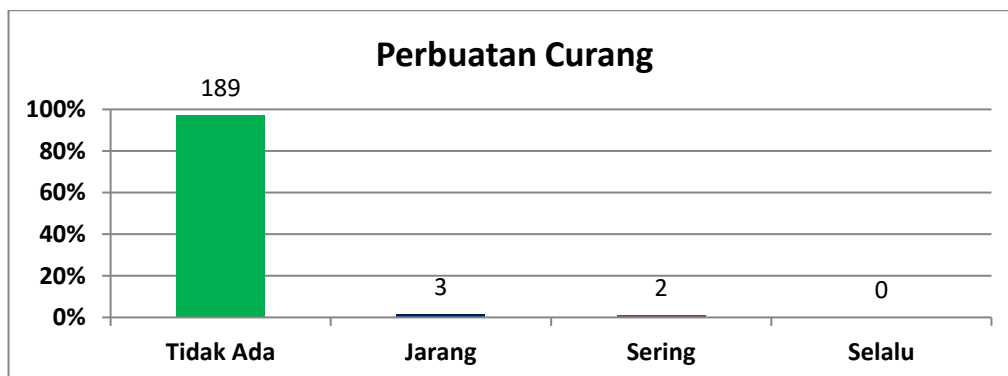
Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Perbuatan Curang dengan pertanyaan **“Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 16.

Indeks pada indikator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Ada	4	189	97,42
2.	Jarang	3	3	1,54
3.	Sering	2	2	1,03
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 15.

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Perbuatan Curang

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar responden tidak pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan.

3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index **3,98** berada

pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA bersih dari praktik **Transaksi Rahasia**.

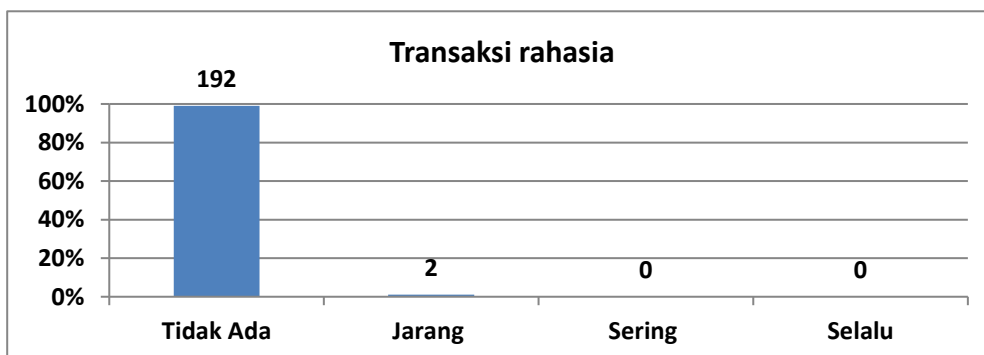
Adapun hasil jawaban kuesioner persepsi korupsi pengguna layanan pengadilan, ruang lingkup Transaksi Rahasia dengan pertanyaan **“Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan?”** dapat disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 17.

Indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			f	%
1.	Tidak Ada	4	192	98,96
2.	Jarang	3	2	1,03
3.	Sering	2	0	0
4.	Selalu	1	0	0
Jumlah			194	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas, secara visual dapat disajikan dalam grafik sebagai berikut



Gambar 16.

Indeks Persepsi Korupsi pada Indikator Transaksi Rahasia

Tabel tersebut menjelaskan bahwa sebagian besar responden tidak pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan.

3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

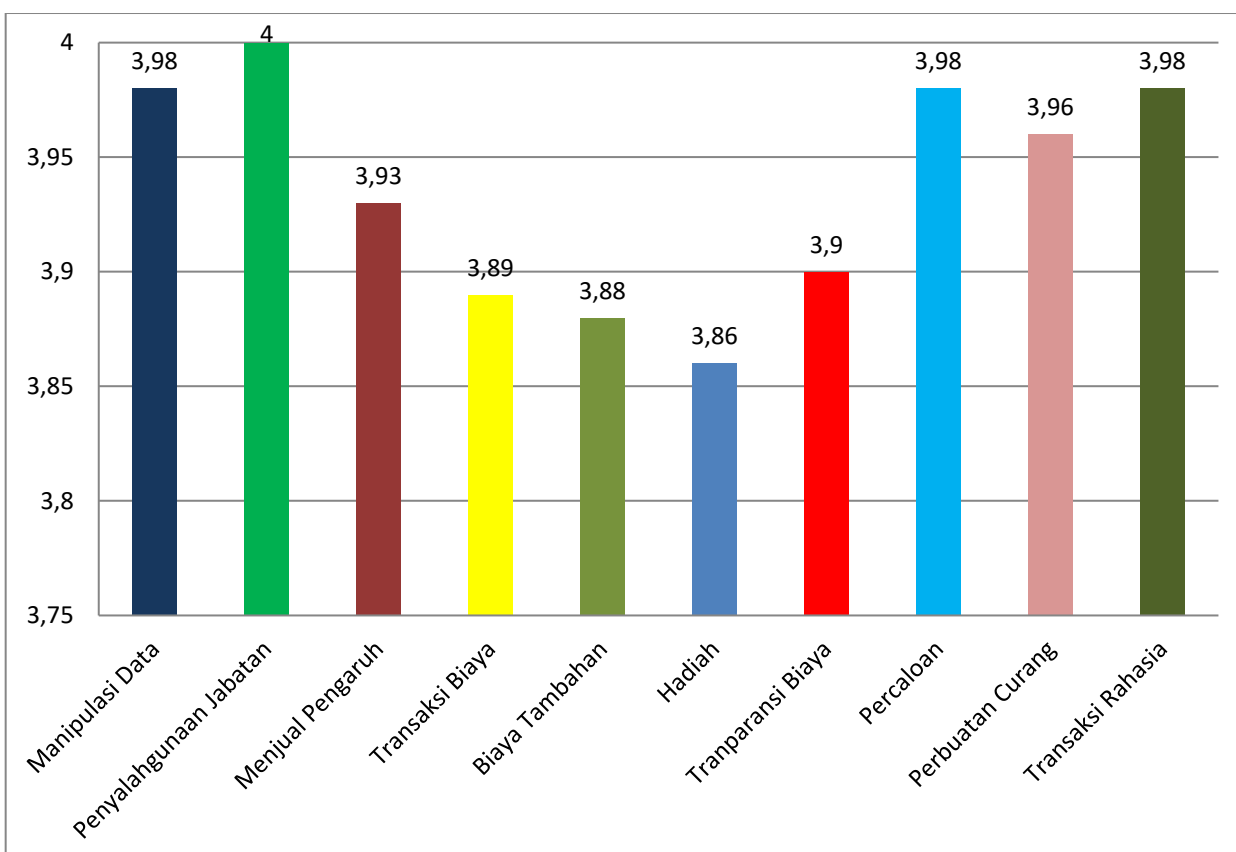
Berdasarkan survei persepsi korupsi di Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA dengan sampel 165. Adapun hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebesar **3,98** berada pada interval skor 3,26 s/d 4,00 kategori **“Bersih dari Korupsi”**.

Hasil IPK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesepuluh ruang lingkup tersebut.

Tabel 18.

**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri,
Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta
Kelas IA**

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
Q 1	Manipulasi Data	3,98	Bersih dari Korupsi	7
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Bersih dari Korupsi	1
Q 3	Menjual Pengaruh	3,93	Bersih dari Korupsi	5
Q 4	Transaksi Biaya	3,89	Bersih dari Korupsi	8
Q 5	Biaya Tambahan	3,88	Bersih dari Korupsi	9
Q 6	Hadiah	3,86	Bersih dari Korupsi	10
Q 7	Tranparansi Biaya	3,90	Bersih dari Korupsi	6
Q 8	Percaloan	3,98	Bersih dari Korupsi	2
Q 9	Perbuatan Curang	3,96	Bersih dari Korupsi	4
Q 10	Transaksi Rahasia	3,98	Bersih dari Korupsi	3



Gambar 17.

**Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri
Yogyakarta**

Indeks **3,94** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka **98**.

Tabel 19.

Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari Korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari Korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerjapada pengadilan

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

Tabel 20.

Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada pengadilan
1	Dipertahankan mutu pelayanan, jangan sampai turun
2	Tetap Menjaga Independensi sebagai Lembaga Pengadilan yang mencerminkan nilai-nilai integritas, moralitas yang bersih dari segala praktek-praktek curang, maupun kegiatan KKN dan tetap melayani dengan baik.
3	Tingkatkan mutu dan SOP Pelayanan Baku
4	Pertahankan Standart Pelayanan PN Yogyakarta
5	Di ruang pelayanan susah sinyal handphone, perlu penguat sinyal
6	Sarana wifi guest kurang lancar, dimana pada zaman sekarang yang segala jenis informasi menggunakan digital maka suatu wifi sangatlah diperlukan.
7	Pertahankan kualitas pelayanan
8.	Kursi Pengunjung PTSP ditambah

9.	Sarana prasarana masjid perlu dibikinkan toilet, sarana prasarana wudhu diperluas, dan dipisahkan / disekat
10.	Parkiran Pengunjung diperluas
11.	Mohon untuk petugas PTSP selalu standby saat jam kerja
12.	Sediakan warung fotokopi

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,94** atau masuk pada kategori **Bersih dari korupsi**

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,98
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,93
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,89
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,88
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,86
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks 3,90
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,98
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,96
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,98

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,433 atau masuk pada persepsi 85.825 Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN-LAMPIRAN.

KUESIONER SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI TAHUN 2020

IDENTITAS RESPONDEN :

1. Nama(boleh inisial atau tidak diisi)
2. Instansi/Perusahaan :
.....
3. Umur(Tahun) :
.....
4. JenisKelamin : 1. Laki-laki 2. Perempuan
5. Pendidikanterakhir (D1/D2/D3/D4) : 1. Tidaksekolah 5. Diploma
2. SD 6. Sarjana(S1)
3. SMP/SLTP Sarjana(S2/S3) 7. Pasca
4. SLTA
5. PekerjaanUtama : 1. PNS 5. Petani/Nelayan
2. TNI/Polri 6. Pedagang
3. PegawaiSwasta 7. Pelajar /Mahasiswa
4. Wiraswasta 8. Lainnya.....

PETUNJUK :

1. Mohon diisi sesuai dengan keadaan Bapak/Ibu/Saudara(i) yang sebenarnya, karena hal ini tidak mempengaruhi kondite maupun pelayanan terhadap Bapak/ Ibu/saudara (i), dan betul-betul untuk kepentinganilmiah.
2. Cara pengisianKuesioner
Bapak/Ibu/Saudara(i) memberi tanda silang (X) atau lingkaran pada pilihan jawaban yang tersedia sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i).

KUESIONER :

Pertanyaan-pertanyaan Survei					
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu/Saudara(i)	Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada	Kode Pengolahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Eksternal					
1.	apakah pelayanan oleh petugas sesuai prosedur dan ketentuan dan tidak dipersulit untuk maksud tertentu? (Manipulasi Peraturan)	1	2	3	4
2.	apakah dalam memperoleh layanan pengadilan secara cepat dan mudah selalu diberikan tanpa ada penawaran dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? (Penyalahgunaan Jabatan)	1	2	3	4
3.	Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara? (Menjual Pengaruh)	1	2	3	4
4.	apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan? (Transaksi Biaya)	1	2	3	4
5.	apakah selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan? (Biaya Tambahan)	1	2	3	4
6.	Memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima (meskipun tidak diminta) ? (Hadiah)	1	2	3	4
7.	Menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayarandilakukan? (Transparasi Biaya)	1	2	3	4
8.	Pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan dipengadilan? (Percaloan)	1	2	3	4
9.	Pernah melihat dan/atau mendengar masih terjadi praktek KKN di pengadilan? (Perbuatan Curang)	1	2	3	4
10.	Pernah mengurus perkara melalui Hakim/Panitera/Staff pengadilan diluar persidangan? (Transaksi Rahasia)	1	2	3	4

Keterangan:

Q1 s.d. Q10

RL

- NRR

- IPK

- *)
NRR Per RL
NRR tertimbang
1
10
0,1

= Unsur-Unsur pelayanan

= Ruang Lingkup IPK

= Nilai rata-rata

= Indeks Persepsi Korupsi

= Jumlah NRR IPK tertimbang

= Jumlah nilai per Ruang Lingkup dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi

= NRR per ruang lingkup x (1 / 10)

=Bobot

= Unsur Pertanyaan

= Bobot NRR Tertimbang

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Nomor	Ruang Lingkup	Nilai	Kategori	Peringkat
Q 1	Manipulasi Data	3,98	Bersih dari Korupsi	8
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00	Bersih dari Korupsi	1
Q 3	Menjual Pengaruh	3,99	Bersih dari Korupsi	2
Q 4	Transaksi Biaya	3,99	Bersih dari Korupsi	3
Q 5	Biaya Tambahan	3,99	Bersih dari Korupsi	4
Q 6	Hadiah	3,94	Bersih dari Korupsi	10
Q 7	Tranparansi Biaya	3,97	Bersih dari Korupsi	9
Q 8	Percaloan	3,99	Bersih dari Korupsi	5
Q 9	Perbuatan Curang	3,99	Bersih dari Korupsi	6
Q 10	Transaksi Rahasia	3,99	Bersih dari Korupsi	7

